

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus, Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Baswir, Revrisond, 1999, *Akutansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta.
- Denny, Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Fahmal, Muin, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia, 2007, *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hamzah, Yaqub, 1984, *Menuju Keberhasilan Manajemen dan Kepemimpinan*, Diponegoro, Bandung.
- Hanitijo Soemitro, Roni, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hariadi, Pranomo, 2013, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

- Huda, Ni'Matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Ida, La Ode, 2002, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, dan Clean Governement*, PSPK, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keban. Y.T, 2008, *Administrasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Koesoemahatmadja, R.D.H, 1979, *Peranan Administrasi Dalam Pembangunan*, Eresco, Bandung.
- Kristianten, 2006, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Labolo, Muhdam, 2010, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2012, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedi Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan*, Airlangga, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengawasan Keuangan Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rakhmat, 2013, *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sibuea, Hotma P, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum, Asas Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Situmorang, M, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumbu, Telly, dkk, 2010, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Tjandra, Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wahidin, Samsul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah*, Fokus Media, Bandung.

## **B. Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian**

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2016, *Petunjuk Pengoprasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa*.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015, *Petunjuk Pelaksanaan dan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.

Pusat Telaah dan Informasi Regional, PATTIRO JEKA, *Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa*.

Dharma, Rio Rizkita, 2014, *Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Akutansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman*, Padang, Universitas Negeri Padang.

Thantowi, Jawahir, 2004, "Norma Hukum Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 3, April 2004, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Salahudin, 2016, *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government*, DPPM Universitas Muhammadiyah Malang.

Tim Riset Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, 2008, *Negara Kesejahteraan & Globalisasi*, Jakarta, Universitas Paramadina.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, 2017, *Materi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.

Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Formasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, 2016, *Petunjuk Pengoprasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5725).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015 Nomor 49).

Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 355/KPTS/2017 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Inspektorat Daerah.

#### **D. Internet**

Tempo “Menyoal Pengaturan Pengelolaan Dana Desa”, *tempo.co/red*, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kebijakan Dana Desa”,

[http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-kebijakan-dana-desa-dan-add-2016\\_kemenkeu.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-kebijakan-dana-desa-dan-add-2016_kemenkeu.pdf), diakses pada 3 oktober 2017.

Kompas, “Korupsi Dana Desa”, [http://regional.kompas.com/read/2017/05/23](http://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan)

[/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan](http://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan), diakses pada Tanggal 25 November 2017.

Tribunnews, “Terkait Dugaan Kasus Korupsi Kades Songbanyu dipanggil Kejati

DIY, <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/03/terkait-dugaan-kasus-korupsi-kades-songbanyu-dipanggil-kejati-diy>, diakses pada Tanggal 25 November 2017.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Keunggulan Aplikasi

Siskeudes”, <https://www.bpkp.go.id/berita/read/18255/0/>, diakses pada 6 April 2018.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Tahun 2017 Kapabilitas APIP

dan Matiritas SPIP Kabupaten Gunung Kidul Siap Level 3”, [www.bpkp.go.id/diy/berita/read](http://www.bpkp.go.id/diy/berita/read), diakses pada tanggal 6 April 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa”

<http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa>, diakses pada tanggal 23 April 2018.